

## ABSTRAK

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah membutuhkan pemahaman menyeluruh dari pelaksanaan Manajemen keuangan daerah, dan adanya penyempurnaan secara kontinyu dari instansi yang berwenang agar tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari *good government governance* dapat menjadi kenyataan. Kelancaran administrasi keuangan pada pemerintah daerah membutuhkan SDM yang berkualitas, dengan tujuan dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian Deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah library Research dan Field Research. sedangkan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Pengamatan, Wawancara dan Studi Dokumen. Metode penganalisaan data yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, diolah, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dalam pemecahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa didalam Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terutama didalam pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Bendahara SKPD, yang terjadi dilapangan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah menerapkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan sistem Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Kata kunci: Sistem, Prosedur, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.**